

BAB II

KEBIJAKAN PERTAHANAN INDONESIA

Pertahanan negara atau pertahanan nasional adalah segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan sebuah negara dan keselamatan suatu bangsa dari ancaman dan gangguan yang ada baik dari dalam maupun luar negeri. Ancaman yang ada dapat bersifat militer maupun non militer. Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut.

Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Dalam merencanakan penyelenggaraan pertahanan negara, Presiden menetapkan sebuah Peraturan Presiden tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagai acuan. Kebijakan Umum Pertahanan Negara berlaku lima tahun sejak awal ditetapkan atau sejak awal Presiden menjabat. Kebijakan ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan TNI dalam penyelenggaraan pertahanan sesuai dengan fungsi masing-masing.

A. Kebijakan *Minimum Essential Force* (2010-2024)

Sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbagai kebijakan mengalami perubahan termasuk kebijakan pertahanan untuk menyempurnakan perkembangan di lingkungan strategis baik di tingkat nasional maupun internasional. Kebijakan yang digunakan Indonesia

untuk bidang pertahanan disebut dengan kebijakan MEF (*Minimum Essential Force*) atau Kekuatan Pokok Minimum yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional dan memenuhi obyek-obyek dari pertahanan negara. Kebijakan ini merupakan sebuah reformasi atas kebijakan pertahanan yang sudah ada dan telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010.¹⁵

Pada tahun 2009, Presiden SBY menginisiasikan kebijakan ini melalui *Strategic Defense Review* (SDR) yang didalamnya dirumuskan berbagai strategi pertahanan negara dari segala aspek seperti persenjataan, sumber daya manusia, pangkalan dan tempat latihan pasukan, industri pertahanan, organisasi, dan anggaran. Selanjutnya, diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Pertahanan No.2 Tahun 2010 sebagai bagian dari postur ideal pertahanan negara.¹⁶

Kebijakan Presiden SBY ini merupakan sebuah langkah positif untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia. Kebijakan ini diarahkan bukan sebagai daya serang seperti perlombaan senjata namun diarahkan untuk membentuk kekuatan pokok yang memenuhi standar serta memiliki efek tangkal.

Kebijakan Kekuatan Pokok Minimum ini memiliki tiga komponen utama. Pertama, *Capability Based Planning* yaitu dengan mengukur kemampuan negara dalam memenuhi kekuatan pertahanannya. Kedua, *Threat Based Planning*, yaitu

¹⁵ Kementerian Pertahanan, *Kebijakan Penyelarasan Minimum Esensial Force Komponen Utama: Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.19 Tahun 2012*, diakses dari <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Permenhan-Nomor-19-Tahun-2012-Lampiran-1.pdf>, pada tanggal 3 Februari 2018

¹⁶ *Ibid.*

dengan memprediksi ancaman apa yang akan dihadapi di masa depan. Ketiga, *Flash Point* yaitu melihat wilayah Indonesia mana saja yang memiliki potensi untuk mendapat ancaman dari luar seperti klaim batas wilayah teritori.¹⁷ Wilayah Indonesia yang begitu luas membuat sering terjadinya persengketaan wilayah perbatasan dan pencurian di perairan Indonesia oleh kapal asing, namun setelah adanya *Flash Point* ini membuat relokasi personel yang lebih banyak ke wilayah-wilayah tersebut sehingga ancaman tersebut dapat dikurangi.

Kebijakan MEF ini akan dilaksanakan pada tiga matra terpadu (TNI AD, AL, dan AU) yang diimplementasikan secara bertahap melalui empat strategi pengembangan Kekuatan Pokok Minimum yakni, rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan pengadaan. Strategi tersebut juga dilengkapi dengan kebijakan TNI dengan prinsip *zero growth* dengan pemenuhan personel di satuan operasional dan *right sizing* atau perampingan organisasi untuk menyiasati keterbatasan anggaran dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan efektivitas kelembagaan.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ TNI AU, *Perampingan Organisasi dan Zero Growth*, TNI Angkatan Udara, diakses dari <https://tni-au.mil.id/perampingan-organisasi-dan-zero-growth/>, pada 3 Februari 2018

Gambar 2 1 Pilar Pertahanan



Sumber: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Kebijakan Penyelarasan *Minimum Essential Force* Komponen Utama

Dengan kebijakan pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum ini kemudian menciptakan sebuah perubahan signifikan dalam lingkungan pertahanan Indonesia. Perubahan signifikan tersebut meliputi modernisasi alutsista yang sudah tidak layak untuk dioperasikan. Kekuatan industri pertahanan dengan memodernisasi alutsista merupakan salah satu dari tiga pilar pertahanan negara. Sebelum kebijakan ini diberlakukan, Pemerintah Indonesia sepertinya tidak terlalu berfokus mengenai permasalahan pemeliharaan alutsista dan hal tersebut tentu akan berpengaruh besar apabila tiba-tiba mendapat ancaman keamanan. Di sisi lain, kebijakan Kekuatan Pokok Minimum ini juga mendorong Industri Pertahanan domestik untuk semakin produktif dan melakukan kerja sama dengan Industri Pertahanan negara-negara lain.

Kebijakan ini merupakan kebijakan jangka panjang dimana akan dilaksanakan selama 15 tahun mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2024 mendatang sehingga akan tetap menjadi fokus pemerintah setelah kepemimpinan Presiden

SBY berakhir. Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, Kebijakan Umum Pertahanan Negara termuat dalam Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2015 yang mana akan berlaku dalam masa periode 2015-2019.

Di era Presiden Jokowi, ada empat kebijakan prioritas pertahanan Indonesia. Pertama, menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan, baik yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit, maupun penyediaan alutsista. Kedua, kemandirian pertahanan agar mampu menghindari ketergantungan pada pasokan produk impor. Ketiga, pertahanan bukan hanya sekadar memenuhi kekuatan pokok minimum, pertahanan harus ditujukan untuk membangun TNI sebagai sebuah kekuatan yang disegani. Yang terakhir adalah menempatkan kegiatan pertahanan keamanan negara sebagai bagian integral dari pendekatan keamanan yang komprehensif.¹⁹

Kebijakan MEF terus dilanjutkan pada era Presiden Jokowi. MEF bisa dikatakan sebagai alternatif yang tepat untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan karena memiliki perencanaan yang cukup baik dalam berbagai aspek, tidak hanya mengenai alutsista, kesejahteraan prajurit pun menjadi fokus agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. MEF ini juga membuat anggaran pertahanan negara dapat digunakan semaksimal dan seefektif mungkin sesuai dengan porsinya masing-masing.

Setelah kebijakan MEF ini diimplementasikan tahun 2010, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam bidang alutsista, tidak hanya dari segi kuantitas namun juga kualitasnya. Pemerintah benar-benar berfokus untuk

¹⁹ Resty Armenia, *Presiden Jokowi Beberkan Empat Kebijakan Pertahanan Prioritas*, CNN Indonesia, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141230114031-32-21287/presiden-jokowi-beberkan-empat-kebijakan-pertahanan-prioritas>, pada tanggal 20 Januari 2018

memenuhi Kekuatan Pokok Minimum. Seperti yang dikatan Presiden Jokowi pada kebijakan pertahanan prioritas adalah kesejahteraan para prajurit dimana adanya peningkatan gaji, tunjangan kebutuhan sehari-hari, tunjangan kesehatan, serta pemenuhan rumah dinas. Dari segi kualitas perekrutan pun ditingkatkan seperti masyarakat yang harus berlatar belakang pendidikan dari D3 hingga S3. Dari segi makanan prajurit pun diperhatikan agar gizi terpenuhi setiap harinya dengan 3.600 kalori/hari.²⁰ Diharapkan dengan semua fasilitas tersebut menjadikan motivasi para prajurit agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik.

MEF ini dibagi kedalam tiga periode yaitu Rencana Strategis (yang selanjutnya akan disebut sebagai Renstra) Renstra I (2009-2014), Renstra II (2015-2019), dan Renstra III (2020-2024).

1. Renstra I (2009-2014)

Dalam Renstra tahap I ini TNI AU telah memodernisasi alutsista nya hingga 48 persen dengan mendatangkan beberapa alutsista canggih yang diantaranya jet tempur F-16, T-50i, Sukhoi, dan EMB-314 Super Tucano, pesawat angkut C-130 Hercules dan CN-295, serta helikopter radar maupun rudal.²¹ Renstra I bisa dikatakan cukup berhasil sebab program modernisasi alutsista ini sudah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi pertahanan Indonesia. Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya, kebutuhan anggaran MEF seluruhnya adalah sebesar Rp471,28

²⁰ Bappenas, *Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara*, diakses dari https://www.bappenas.go.id/files/1113/5184/9209/bab-7_20091007161707_8.pdf, pada tanggal 20 Februari 2018

²¹ Syaiful Hakim, *Kadispenu: Modernisasi Alutsista Tak Boleh Ditawar*, Antara, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/623179/kadispenu-modernisasi-alutsista-tak-boleh-ditawar>, pada tanggal 20 Januari 2018

triliun.²² Berikut ini adalah hasil alutsista yang telah kontrak dibeli dari program Renstra I di tiga matra TNI.

Tabel 2 1.
TNI AD

Jumlah	Jenis	Asal Negara
8 Unit	Helikopter serbu AH-64E Apache Guardian	Amerika Serikat
180 Unit	Rudal anti tank Javelin	
22 Unit	Helikopter Bell 412 EP	Kerjasama produksi Amerika Serikat dan PT DI
12 Unit	Helikopter Fennec	
6 Unit	Bushmaster	Australia
150 Unit	Ranpur angkut pasukan M113	Belgia
38 Unit	MLRS Astros II Mk6	Brazil
10 Unit	Panser APC Norinco	China
10 Unit	Arhanud TD2000	
300 Unit	Peluru kendali Starstreak	Inggris
103 Unit	Tank Leopard	Jerman
50 Unit	IFV Marder	
18 Unit	Artileri 155 mm KH 179	Korea Selatan
54 Unit	Artileri 105 mm KH 178	
22 Unit	Panser Tarantula	
37 Unit	Artileri Mobile Caesar Nexter	Perancis
136 Unit	Peluru kendali Mistral	
300 Unit	Panser Anoa	Pindad
12 Unit	Helikopter angkut Mi-17	Rusia
5 Unit	Helikopter serbu Mi-35	
600 Unit	Rudal anti tank NLAW	Swedia

Sumber: Militer Meter, Daftar Alutsista TNI Hasil MEF dari Era Presiden SBY

²² Fakhrizal Fakhri, *Komisi I DPR: Pertahanan Indonesia Perlu Diperkuat*, Okezone, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2017/12/27/337/1836630/komisi-i-dpr-pertahanan-indonesia-perlu-diperkuat>, pada tanggal 20 Januari 2018

Tabel 2 2
TNI AL

Jumlah	Jenis	Asal Negara
4 Unit	Pesawat latih Bonanza Beechcraft	Amerika Serikat
2 Unit	Pesawat latih Baron G58	
5 Unit	Helikopter Bell 412EP	Kerjasama produksi Amerika Serikat dan PT DI
2 Unit	KRI jenis PKR 10514	kerjasama Belanda dan PT PAL
9 Unit	Artileri roket MLRS RM Grad	Ceko
8 Unit	Artileri roket MLRS Vampire	
8 Unit	Arhanud MLRS Norinco type 90	China
80 Unit	Peluru kendali anti kapal C-705	
20 Unit	Peluru kendali anti kapal C-802	
90 Unit	Peluru kendali QW3 Marinir	
3 Unit	KRI jenis Light Fregat Bung Tomo Class	Inggris
3 Unit	KRI jenis Kapal Selam Changbogo	Korea Selatan
2 Unit	KRI jenis Kapal Hidro Oceanografi	Perancis
11 Unit	Helikopter anti kapal selam Panther	
8 Unit	Helikopter anti kapal permukaan	
30 Unit	Peluru kendali anti kapal Exocet	
60 Unit	Tank Amfibi BMP 3F	Rusia
6 Unit	Peluru kendali anti kapal Yakhont	
1 Unit	KRI Bimasuci mengganti Dewaruci	Spanyol
5 Unit	Panser Amfibi BTR4	Ukraina
8 Unit	KRI jenis Kapal Cepat Rudal 40 m	Galangan swasta nasional
3 Unit	KRI jenis Kapal Cepat Rudal 60 m	PT PAL
3 Unit	KRI jenis Landing Ship Tank	Galangan kapal nasional
2 Unit	KRI jenis Bantu Cair Minyak	
16 Unit	KAL jenis Kapal Patroli Cepat	
4 Unit	Pesawat patroli maritim CN-235	PT DI

Sumber: Militer Meter, Daftar Alutsista TNI Hasil MEF dari Era Presiden SBY

Tabel 2 3
TNI AU

Jumlah	Jenis	Asal Negara
24 Unit	Jet tempur F-16 Blok 52 ID	Amerika Serikat
	Paket lengkap persenjataan rudal untuk 24 F-16	
5 Unit	Pesawat angkut berat C-130H Hercules	Australia
3 Unit	Wahana latih C-130 Hercules	
16 Unit	Pesawat Coin Super Tucano	Brazil
200 Unit	Peluru kendali Paskhas QW3	China
8 Unit	Radar Master T	Inggris
6 Unit	UAV Searcher dari	Israel
18 Unit	Pesawat latih Grob	Jerman
8 Unit	Arhanud Oerlikon Skyshield	
16	Jet latih tempur T50i Golden Eagle	Korea Selatan
24	Pesawat latih KT-1B Wong Bee	
3 Unit	Helikopter Super Puma NAS332	Perancis
6 Unit	Helikopter EC725	
6 Unit	Jet tempur Sukhoi Su-30	Rusia
	Paket lengkap persenjataan rudal untuk 16 Sukhoi	
11 Unit	Pesawat angkut sedang C-295	Spanyol
3 Unit	Pesawat patroli CN-235 MPA	PT DI
12 Unit	UAV Wulung	PT BPPT dan PT DI

Sumber: Militer Meter, Daftar Alutsista TNI Hasil MEF dari Era Presiden SBY

2. Renstra II (2015-2019)

Memasuki Renstra II, Indonesia mengalami perubahan kepemimpinan yang biasanya apabila terjadi pergantian pemerintahan membuat program pemerintah yang sebelumnya tidak dilanjutkan oleh pemerintah yang baru atau diganti dengan kebijakan yang baru. Namun, dalam pemerintahan Presiden Jokowi ini, program MEF tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Beberapa fokus kebijakan prioritas TNI AU dalam Renstra II ini yang pertama yaitu, meningkatkan profesionalisme personel. Dalam meningkatkan profesionalisme personel ini, berbagai kegiatan telah dilakukan yaitu, pembangunan sarana prasarana, latihan matra udara, penggunaan kekuatan pertahanan matra udara baik untuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Renstra tahap ini dialokasikan dengan anggaran untuk matra darat anggaran diperkirakan sebesar RP9,3 triliun, matra laut RP17,9 triliun dan matra udara dengan anggaran terbesar mencapai Rp93,9 triliun.²³

Fokus kebijakan yang kedua yaitu modernisasi alutsista atau non-alutsista atau sarana dan prasarana matra udara. Pada fokus ini, TNI AU telah melakukan penambahan satu skuadron pesawat tempur F-16 bekas pakai AU Amerika Serikat. Walaupun bekas pakai, pesawat tempur tersebut sudah dipastikan telah ditingkatkan kemampuannya. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan bermarkas di Pangkalan Udara Utama Roesmin Noerjadin, Pekanbaru, Riau. Selain itu, TNI AU juga melakukan modernisasi alutsista pengganti F-5 Tiger yang sudah lebih dari satu tahun tidak terbang. Kepala Staf TNI AU (KSAU), Marsyal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan telah mengajukan berkas untuk pengganti pesawat tempur F-5 Tiger tersebut namun tidak disebutkan apa jenis dan merk pesawatnya karena tugas TNI AU yang sebagai pengguna hanya menyebutkan spesifikasi apa yang

²³ Sucipto, *Renstra Alutsista Untuk TNI AU Paling Besar*, Sindonews, diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1020972/149/renstra-alutsista-untuk-tni-au-paling-besar-1436234514>, pada tanggal 3 Februari 2018

dibutuhkan, keputusan akan berada di tangan Kementerian Pertahanan.

Dan fokus kebijakan yang ketiga adalah pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terdepan dan terluar. Pada fokus ini, TNI AU menambah 4 unit *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) atau pesawat tanpa awak untuk pemantauan di wilayah perbatasan yang ditempatkan di Skadron Udara 51, Lanud Supadio, Pontianak. TNI AU juga akan menambah 3 unit pesawat *Combat Search and Rescue* (SAR)/*surveillance/amphibi*, 4 unit radar GCI (*Ground Controlled Interception*), 2 satbak rudal jarak sedang, 3 unit helikopter angkut kelas berat, dan 6 unit helikopter EC-725 cougar. Kedepannya, TNI AU berharap agar dapat memenuhi kebutuhan radar untuk memantau wilayah udara Indonesia yang masih belum terjangkau.

Tidak hanya TNI AU saja yang mengalami peremajaan persenjataan, Angkatan Darat dan Angkatan Laut juga mengalami hal yang sama. Untuk Angkatan Darat menambah tujuh belas unit helikopter *Black Hawk* dan tiga unit Chinook. Kedua helikopter tersebut merupakan yang terbaik di dunia dan memiliki dua fungsi, digunakan sebagai operasi militer maupun operasi penyelamatan.²⁴ Sementara itu, Angkatan Laut juga menambah tiga unit kapal selam kelas Chang Bogo dari Korea Selatan dan tiga unit

²⁴ Fahrizal Lubis, *17 Helikopter Black Hawk dan 3 Chinook Segera Perkuat TNI AD*, Liputan 6, diakses dari <http://news.liputan6.com/read/2037522/17-helikopter-black-hawk-dan-3-chinook-segera-perkuat-tni-ad>, pada tanggal 5 Februari 2018

kelas Kilo dari Rusia, dan juga sebelas unit Helikopter Antikapal Selam.²⁵

Kepala Staf TNI AU (KSAU) mengatakan hingga tahun 2017, MEF tahap II ini sudah terpenuhi 40 persen. Modernisasi alutsista merupakan hal yang utama dan tidak bisa ditunda-tunda lagi pengadaannya. Lingkungan strategis selama lima tahun ke depan akan semakin berkembang yang menyebabkan tantangan yang dihadapi TNI akan semakin kompleks.²⁶

Data Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyebutkan bahwa 52% alutsista yang dimiliki TNI berusia diatas 30 tahun.²⁷ Oleh karena itu, dengan adanya program MEF ini, diharapkan alutsista yang usianya sudah tua dapat digantikan secara perlahan-lahan dengan yang baru.

3. Renstra III (2020-2024)

Renstra tahap ini diharapkan sebagai renstra berkelanjutan yang akan diteruskan oleh pemimpin selanjutnya dengan pemenuhan yang lebih maksimal lagi agar target MEF tercapai seluruhnya. Kebijakan MEF ini sangat membawa dampak positif terhadap

²⁵ Aulia Pratama, *Perkuat Armada, TNI AL Sudah Pesan 11 Heli dan 6 Kapal Selam*, CNN Indonesia, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150916155555-20-79171/perkuat-armada-tni-al-sudah-pesan-11-heli-dan-6-kapal-selam>, pada tanggal 5 Februari 2018

²⁶ Syaiful Hakim, *Loc. Cit.*

²⁷ Sucipto, *52% Alutsista TNI Beroperasi Lebih Dari 30 tahun*, Sindonews, diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1019927/14/52-alutsista-tni-beroperasi-lebih-dari-30-tahun-1435931916>, pada tanggal 5 Februari 2018

lingkungan pertahanan militer Indonesia. Banyak sekali alutsista yang sudah dimodernisasi baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Tidak hanya kualitas senjata yang membaik, tetapi juga hubungan dengan negara produsen dari sisi politis. Kebijakan MEF yang netral dan tidak memihak pihak manapun membuat Indonesia membeli alutsista dari banyak negara tidak hanya bergantung di satu negara. *Trust Building* antar negara otomatis terbentuk karena membeli senjata dari negara tersebut dan mendapat kepercayaan untuk menggunakannya secara baik. Dari segi ekonomi, kerja sama dengan negara produsen meningkat dan lebih intens dari sebelumnya.²⁸ Selain itu, Indonesia juga banyak memiliki *Flash Point* jika terjadi ancaman sewaktu-waktu.

B. Kebijakan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI

Pada tahun 2011, Presiden SBY menyampaikan tiga kebijakan dasar pengadaan alutsista. Pertama, wajib membeli alutsista yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri. Kedua, jika belum bisa diproduksi sendiri, alutsista dibeli dari negara lain dengan syarat tidak diikuti embel-embel syarat tertentu, terutama syarat yang berhubungan dengan politik. Ketiga, jika belum bisa memproduksi alutsista yang diinginkan, Indonesia perlu membangun kerja sama dengan negara lain sehingga pada saatnya nanti Indonesia mampu membuat alutsista tersebut.²⁹ Intinya, Presiden SBY ingin agar

²⁸ Ajie Pratama, *Efektivitas Minimum Essential Force Pertahanan Indonesia*, Academia, diakses dari http://www.academia.edu/25204222/Efektivitas_Minimum_Essential_Force_Pertahanan_Indonesia, pada tanggal 2 Maret 2018

²⁹ Tommy Trinugroho, *Tiga Kebijakan Dasar Pengadaan Alutsista*, Kompas, diakses dari

Indonesia menjadi sebuah negara yang mandiri dalam hal persenjataan.

Pengadaan alutsista TNI adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan persenjataan yang didalamnya melalui berbagai proses dari perencanaan sampai akhirnya alutsista tersebut diterima oleh TNI yang nantinya digunakan untuk melaksanakan tugas pokoknya. Dalam penyediaan alutsista, sesuai dengan kebijakan Presiden SBY, TNI selalu berusaha untuk membeli persenjataan dari industri pertahanan dalam negeri. Namun, apabila industri pertahanan dalam negeri belum mampu untuk memproduksinya, maka TNI akan membeli persenjataan dari luar negeri yang merupakan pabrik terpercaya dan sebisa mungkin adanya *transfer of technology*.

Kebijakan tentang pengadaan alutsista juga tertuang dalam Kebijakan Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) bidang pengadaan yaitu:³⁰

1. Pengadaan Alutsista dan suku cadang serta pengadaan materiil khusus untuk pasukan khusus TNI secara terbatas dengan cara seksama dan mengutamakan hasil industri dalam negeri dengan melibatkan BUMNIS.
2. Pengadaan luar negeri diupayakan dengan cara langsung dari produsen atau G-To-G dan diupayakan adanya proses alih teknologi.
3. Pengadaan barang / jasa ini diselenggarakan secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, akuntabel, teknis dan biaya serta sesuai dengan standar militer atau standar lain dengan Standar Militer Indonesia

<https://nasional.kompas.com/read/2011/11/10/12024428/Tiga.Kebijakan.Dasar.Pengadaan.Alutsista>, pada tanggal 20 Februari 2018

³⁰ Kementerian Pertahanan, *Kebijakan Baranahan*, diakses dari <https://www.kemhan.go.id/baranahan/kebijakan-baranahan>, pada tanggal 20 Februari 2018

(SMI) dan dengan mencantumkan kode NSN (*National Stock Number* / Nomor Sediaan Nasional).

4. Pengadaan Alutsista dan peralatan lain diprioritaskan untuk mengisi kekuatan pokok minimal sesuai spesifikasi teknis dan persyaratan operasional yang telah ditetapkan.

Sistem pengadaan alutsista merupakan salah satu isu krusial dalam bidang pertahanan. Banyak pihak berpendapat bahwa pengadaan alutsista di Indonesia tidak efisien dan tidak efektif karena dianggap terlalu boros dalam proses pengadaan tersebut. Padahal, anggaran yang disediakan oleh pemerintah masih jauh dari kebutuhan yang diperlukan TNI. Maka dari itu diperlukan efisiensi dari pengelolaan pengadaan alutsista sesuai dengan kebijakan MEF yang telah diberlakukan.³¹

Setiap tahunnya, pemerintah selalu berupaya untuk menata sistem pengadaan alutsista dengan mengeluarkan kebijakan satu pintu.³² Kebijakan pengadalan alutsista bagi TNI harus dilaksanakan melalui Kementerian Pertahanan sebagai otoritas politik dalam kebijakan pertahanan. Kebijakan ini mengharuskan pengadaan alutsista TNI wajib mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI harus melalui Kementerian Pertahanan apabila ingin membeli sebuah alutsista. Kemudian, Kementerian Pertahanan akan menunjuk perusahaan konsorsium atau pihak yang berwenang untuk selanjutnya melakukan pengadaan alutsista. Kebijakan sistem pengadaan alutsista satu pintu merupakan

³¹ Mohamad Rohimat, *Analisis Sistem Pengadaan Alutsista Di Indonesia*, Perpustakaan Digital ITB, diakses dari <https://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptitbpp-gdl-mohamadroh-31759>, pada tanggal 5 Februari 2018

³² Haryo Adjie, *Pengadaan Alutsista TNI AL, Antara Harapan dan Kenyataan*, Indomiliter, diakses dari <http://www.indomiliter.com/pengadaan-alutsista-tni-al-antara-harapan-dan-kenyataan-1/>, pada tanggal 6 Februari 2018

hal yang penting agar pemerintah mengetahui dengan jelas dari siapa dan untuk siapa alutsista itu diadakan.

Kementerian Pertahanan akan mendapatkan permintaan dari TNI mengenai alutsista apa saja yang harus dimodernisasi. Walaupun pergantian panglima TNI terjadi, ada dua hal yang selalu ada yaitu kelanjutan program modernisasi alutsista dan peningkatan kesejahteraan personel. Dua hal tersebut selalu berdampingan mengingat kesiapan alutsista merupakan bagian dari kesejahteraan personel. Kualitas alutsista yang baik tentu akan membuat para personel bekerja dengan tenang demi terjaganya keselamatan.

Presiden Jokowi mengatakan pengadaan alutsista harus berdasarkan kebutuhan Tentara Indonesia bukan berdasarkan keinginan semata. Ketika pengadaan alutsista diadakan, maka Menteri Pertahanan akan menerima masukan dari semua matra, baik itu Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara, sehingga alutsista yang nanti dibeli benar-benar terencana dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh TNI. Menurut Presiden Jokowi, setiap pembelian alutsista harus ada transparansi kepada publik dan menerapkan UU industri pertahanan seperti harus adanya alih teknologi dari negara produksi terhadap industri pertahanan nasional demi kemandirian industri pertahanan nasional di masa depan.³³

Presiden Jokowi mengatakan perlu ada terobosan baru untuk mengubah pola belanja alutsista agar menjadi investasi pertahanan di masa akan datang. Kementerian Pertahanan harus mengkalkulasi setiap pembelian alutsista mana yang akan memberikan keuntungan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang bagi industri pertahanan

³³ Fakhrizal Fakhri, *Jokowi: Saya Ingin Pengadaan Alutsista Transparan, Jangan Dikorupsi!*, Okezone, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2017/07/26/337/1744403/jokowi-saya-ingin-pengadaan-alutsista-transparan-jangan-dikorupsi>, pada tanggal 5 Februari 2018

nasional maupun kepentingan nasional.³⁴ Kementerian pertahanan juga harus mengoptimalkan setiap pengadaan alutsista agar terciptanya kemandirian industri pertahanan nasional dan produksi bersama yang memungkinkan hak cipta alutsista dimiliki industri pertahanan nasional serta relokasi fasilitas produksi dari negara produsen ke Indonesia. Syarat pengadaan alutsista lainnya adalah proses pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antar pemerintah atau G to G untuk mengurangi harga transaksi yang biasanya membengkak karena adanya perantara. Dalam pengadaan alutsista harus diterapkan prinsip transparansi biaya pembelian sehingga tidak ada lagi praktik korupsi yang terjadi. Karena alutsista dibeli dari uang rakyat, Presiden Jokowi memperingatkan agar alutsista dapat digunakan dalam melindungi rakyat, negara dan bangsa dari segala bentuk ancaman yang ada.³⁵

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa alutsista TNI harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang begitu cepat menyebabkan teknologi berkembang begitu pesat dan dapat mempengaruhi corak peperangan di masa depan. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan Indonesia juga harus memiliki alutsista berteknologi mutakhir agar dapat menjaga wilayah kedaulatan Indonesia.

Presiden Jokowi menegaskan agar setiap pembelian alutsista harus yang benar-benar baru bukan merupakan bekas pakai atau hasil hibah. Kualitas pesawat baru tentu berbeda

³⁴ Joko Susilo, *Presiden Jokowi: Ubah Pola Belanja Alutsista Jadi Investasi*, Antara, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/574142/presiden-jokowi-ubah-pola-belanja-alutsista-jadi-investasi>, pada tanggal 10 Januari 2018

³⁵ Fabian Kuwado, *Ditawari Alutsista dari Negara Asing, Jokowi Ingatkan Indonesia Harus Tetap Mandiri*, Kompas, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/26/16560481/ditawari-alutsista-dari-negara-asing-jokowi-ingatkan-indonesia-harus-tetap>, pada tanggal 10 Februari 2018

dengan pesawat hasil hibah maupun bekas pakai. Berbagai kecelakaan pesawat terjadi karena kesalahan teknis atau buruknya kualitas mesin yang ada. Salah satunya ada jatuhnya pesawat Hercules di Papua pada tahun 2016, padahal pesawat tersebut kurang dari setahun bergabung dengan TNI AU Indonesia. Pesawat tersebut merupakan hibah dari Angkatan Udara Australia atau *Royal Australian Air Force* (RAAF).³⁶

Pengadaan alutsista hibah bukanlah hal yang baru karena hal ini sudah terjadi dari tahun 1970an. Pada saat itu Indonesia memiliki anggaran yang terbatas dalam bidang pengadaan senjata. Membeli alutsista hibah merupakan salah satu cara menyiasatinya. Pengadaan pesawat tempur menjadi perhatian khusus dibanding matra darat dan matra laut karena memiliki padat teknologi yang membuat harganya melambung tinggi. Indonesia pernah menerima hibah pesawat tempur F-86 Avon Sabre dari Australia.³⁷ Walaupun kemampuannya jauh di bawah MiG Rusia, tetapi pesawat tempur tersebut sangat berguna dalam menyiapkan para pilot untuk menerbangkan pesawat F-5 Tiger Amerika Serikat yang didatangkan pada tahun 1980.

Program modernisasi alutsista selalu menimbulkan sebuah dilema dimana skema hibah selalu menjadi solusi ditengah keterbatasan anggaran agar dapat mempunyai berbagai alutsista yang dapat menjaga kedaulatan negara. Di sisi lain, tentu kualitas alutsista baru berbeda dengan kualitas alutsista hasil hibah walaupun sudah ditingkatkan kualitasnya.

³⁶ Andi Hartik, *Pesawat Hercules TNI AU Yang Jatuh Di Papua Hibah Dari Australia*, Kompas, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2016/12/18/15321811/pesawat.hercules.tni.au.yang.jatuh.di.papua.hibah.dari.australia>, pada tanggal 10 Februari 2018

³⁷ Ramadhian Fadillah, *Indonesia Langganan Hibah Pesawat Militer Bekas, Merdeka*, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-langganan-hibah-pesawat-militer-bekas.html>, pada tanggal 2 Februari 2018

Kondisi geografis Indonesia yang luas mengharuskan untuk memperkuat alutsista sehingga tidak tertinggal dengan negara di kawasan seperti Malaysia, Singapura, dan Australia yang cukup agresif dalam pengadaan alutsista. Menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan penting dilakukan agar alutsista TNI memiliki *deterrent effect* karena sampai saat ini di Asia Tenggara ketegangan berbagai negara terus terjadi mengenai konflik Laut Cina Selatan.

Indonesia merupakan sebuah negara non blok yang menganut politik luar negeri bebas aktif. Sejak awal mengimpor berbagai persenjataan, Indonesia selalu menghindari negara produsen tunggal untuk memasok persenjataan di negaranya. Indonesia secara fleksibel selalu membeli persenjataan dari berbagai negara produsen di dunia dengan mengabaikan apakah negara tersebut blok barat ataupun blok timur.

1. Tahap-tahap Pengadaan Alutsista

Ada banyak institusi yang terlibat dalam tahap pengadaan alutsista TNI. TNI sebagai pengguna dan Kementerian Pertahanan sebagai otoritas utama tidak pernah bermain-main dalam hal pengadaan alutsista. Pemerintah sadar bahwa dalam pengadaan alutsista, tanggung jawab yang diemban begitu besar sebab uang yang digunakan untuk membeli alutsista adalah uang rakyat. Oleh sebab itu, setiap prosesnya diawasi oleh berbagai pihak. Salah satu pihak yang berperan penting adalah organisasi induk. Organisasi Induk adalah organisasi pengadaan yang mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan, pengawasan dan pengendalian serta melaksanakan

proses pengadaan alutsista TNI.³⁸ Organisasi induk terdiri dari Menteri Pertahanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, dan tiga Kepala Staf Angkatan. Tugas organisasi induk ini secara umum adalah untuk menentukan kebijakan program pengadaan alutsista TNI.

Banyaknya pihak yang mengawasi dalam pengadaan alutsista ini membuat kemungkinan penyalahgunaan dana tersebut sangat kecil. Pihak-pihak yang mengawasi seperti Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektur Jenderal TNI, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan. Terdapat pihak-pihak eksternal Kementerian Pertahanan dan TNI dalam pengadaan alutsista ini diantaranya Kementerian Keuangan, Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS), dan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP).

Dalam mengadakan alutsista, TNI mempunyai prinsip untuk efisien, efektif, transparan dalam pengelolaan anggaran, menjamin kerahasiaan, bersain, tidak diskriminatif, dan akuntabel.³⁹ Dalam setiap pembelian alutsista, Kementerian Pertahanan selalu memperhatikan secara detail terhadap kontrak yang akan ditandatangani. Ketika pembelian senjata impor, proses transaksi melalui *Letter of Credit*. Sistem ini berisi tentang negosiasi antara pihak konsumen dan produsen hingga mencapai kesepakatan. Dalam sistem ini juga dikatakan agar kedua belah pihak harus menyerahkan jaminan dan pembayaran *down payment*.

³⁸ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014*, (Jakarta: 2014), hal. 4

³⁹ *Ibid.*

Hal lain yang juga dilampirkan dalam kontrak tersebut diantaranya pernyataan tentang batas akhir ekspor, embargo, pelimpahan wewenang, dan penggunaan materi kontrak. Dalam penyusunan kontrak pengadaan alutsista, Kementerian Pertahanan berpedoman pada Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (SDPBJP).

Presiden Jokowi mengatakan bahwa tidak hanya melihat kebutuhan militer, tetapi inti pokok hingga tahun 2024 nanti adalah Indonesia membutuhkan persenjataan yang harus disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia dengan wilayah udara yang begitu luas hingga garis pantai yang begitu panjang. Pesawat tempur, helikopter, kapal selam, dan kapal perang nantinya akan menghiasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Empat lembaga besar seperti Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, serta dua lembaga besar dari sisi pemerintah yang harus terlibat yaitu Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini hanya merupakan sebagian kecil pihak yang terlibat dalam proses pengadaan alutsista. Di dalamnya terdapat banyak sekali tim yang dibentuk untuk mensukseskan pengadaan alutsista hingga sampai ke tangan TNI sebagai pengguna. Lembaga yang akan bekerja sama nantinya baik dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri misalnya ada Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis dan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan seperti PT. Pindad dan PT. Dirgantara Indonesia. Dari luar negeri, tidak hanya industri pertahanan yang dimiliki oleh negara-negara lain di dunia saja yang bisa terlibat, tetapi juga lembaga-lembaga swasta dapat terlibat dalam

pengadaan alutsista TNI sebagai penyedia dari alutsista.

Proses pengadaan alutsista yang begitu panjang dari awal direncanakan hingga sampai ke tangan TNI bisa memakan waktu bertahun tahun.

Gambar 2 2

Lembaga yang Terlibat Dalam Proses Pengadaan Alutsista



Sumber: Metro TV News, Begini Prosedur Pengadaan Alutsista

Berdasarkan gambar di atas, proses pengadaan alutsista dimulai dari poin pertama yaitu penentuan jenis alutsista dari keberadaan tiga matra TNI yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dalam sebuah skema dikatakan bahwa tiga matra ini harus menentukan spesifikasi alutsista apa yang harus dimodernisasi sesuai dengan kebutuhan. Mereka hanya menyebutkan spesifikasi yang dibutuhkan saja tanpa boleh menyebutkan merk atau berasal dari negara mana senjata tersebut nantinya. Apabila seluruh proposal yang berisikan daftar dan rekomendasi ini nantinya akan dimasukkan ke markas besar TNI. Proposal tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah rangkaian kebutuhan operasional. Dikaji lebih lanjut dan apabila dirasa sudah siap makan akan diusulkan ke Kementerian Pertahanan. Di poin ini, Kemenhan akan membentuk sebuah tim yang disebut sebagai Tim Evaluasi Pengadaan yang dikoordinatori oleh Sekjen Kemenhan. Apabila Kemenhan sudah mengevaluasi proposal tersebut dan spesifikasi sudah dianggap sesuai maka kemudian Kementerian

Keuangan selanjutnya akan dilibatkan. Kementerian Keuangan berfungsi menyediakan kontrak perjanjian pinjaman. Kontrak tersebut tentu sudah sesuai dengan standar anggaran belanja negara dan juga skema keuangan atau pinjaman yang akan diberikan terkait pengadaan alutsista. Keberadaan DPR RI menjadi penting karena keputusan untuk disahkannya pengadaan alutsista berada di tahap ini. Yang mengurus pengadaan alutsista yaitu Komisi I sebagai partner dari Kemenhan dan juga TNI yang nantinya akan melihat apakah keputusan untuk mengadakan alutsista sudah tepat atau belum. Disini juga akan masuk dalam Panitia Kerja atau Panjda yang bertugas untuk mencabut bintang. Bintang inilah yang menjadi penting karena apabila bintu sudah dicabut maka dokumen tersebut berarti sudah siap untuk diadakan dalam bentuk alutsista.

Seluruh prosedur tersebut berlangsung selama satu setengah hingga tiga tahun yang berarti memakan cukup lama waktu belum lagi kedatangan alutsista secara bertahap yang biasanya juga memakan waktu bertahun-tahun. Kepala Satuan Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa TNI AU harus terus dapat membaca setiap situasi dengan cermat agar mampu berpikir cepat dalam memutuskan dan mampu bertindak secara bijaksana. Oleh karena itu, kebutuhan yang diprediksi oleh TNI harus sudah jauh ke depan mengingat lamanya proses pengadaan ini agar kebutuhan alutsista dalam negeri dapat terpenuhi sesuai dengan teknologi yang memadai.

Semua proses pengadaan alutsista sudah memiliki aturannya yang ditentukan lewat Perpres. Semua proses harus sesuai dengan Perpres tidak bisa sembarangan dan harus melalui tender terbuka. Akan

tetapi, tidak semua aspek kemudian akan diberitahukan ke publik, ada beberapa hal yang tidak bisa dibocorkan karena berkaitan dengan kerahasiaan negara.

Perencanaan strategis AU harus berada pada sasaran yang realistis. TNI AU harus dapat menyiapkan Kekuatan Pokok Minimum yang mampu mendukung pelaksanaan tugas TNI AU baik dalam tugas operasi militer untuk perang maupun selain perang. Kedepannya, kebijakan TNI AU tetap mengarah pada upaya meningkatkan kesiapan operasional, untuk melaksanakan tugas TNI AU di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

2. Kerjasama Pembelian Pesawat Tempur Indonesia dari Amerika Serikat

Hubungan Militer Indonesia dan Amerika Serikat dalam pembelian pesawat tempur militer dimulai pada tahun 1980an. Pada 5 Oktober 1980, saat parade hari ABRI, pesawat tempur F-5E AS tampil dalam acara tersebut.⁴⁰ Keberadaan pesawat ini dikarenakan menurunnya performa pesawat F-86 Avon Sabre yang dimiliki Indonesia.

Rencana pembelian diadakan pada tahun 1978 oleh Operasi Komodo. Operasi komodo ini merupakan tim yang melaksanakan pembangunan fasilitas yang

⁴⁰ Iwan Santosa, *F-5E Tiger, Pertahanan Udara Orde Baru*, Kompas, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2015/03/25/15100061/F-5E.Tiger.Pertahanan.Udara.Orde.Baru>, pada tanggal 21 April 2018

akan digunakan di Lanud Iswahjudi dan pendidikan bagi para *crew* yang akan dipersiapkan untuk menjadi penerbang, instruktur, dan teknisi pesawat. Pelatihan kepada TNI AU oleh teknisi AS sudah berlangsung sejak 5 Desember 1979 di Negara Bagian Arizona, AS. Tiga penerbang TNI AU yang dikirim saat itu untuk mengikuti pendidikan di AS dengan menggunakan pesawat F-5 B dan F-5 E/F mulai 27 Januari 1980. Para penerbang yang berhasil menerbangkan pesawat F-5 kemudian mendapat sebutan 'Eagle'.

Pesawat tempur F-5 E/F Tiger II tiba di Indonesia pada 21 April 1980 di Lanud Iswahjudi, Madiun, Jawa Timur. Sebanyak 8 unit dari 16 unit pesawat diangkut dengan menggunakan pesawat C-5A Galaxy milik Military Airlift Command USAF yang diterbangkan langsung dari Amerika Serikat, sedangkan sisanya dikirim pada 5 Juli 1980. Pada tanggal 28 April 1980, pesawat F-5 berhasil melakukan uji terbang untuk pertama kalinya.

Pesawat tempur F-5E kemudian dioperasikan oleh skuadron udara 14 yang sebelumnya telah menerbangkan pesawat MiG-21 dari Rusia dan F-86 Avon Sabre dari Australia. Pesawat ini terkenal dengan kecepatannya yang tinggi sehingga dibutuhkan kemampuan khusus untuk mengoperasikannya. Kecepatan yang dimiliki pesawat ini adalah 940 knot atau 1,5 kali kecepatan suara.

Pada awal tahun 1990-an, pesawat ini disebut masih mampu bersaing dengan pesawat-pesawat tempur terbaru saat itu. Namun kemampuan avionik dan sistem senjatanya harus ditingkatkan. Modernisasi sempat terhenti karena embargo AS terhadap Indonesia saat itu. Akan tetapi, pimpinan TNI AU

menyelenggarakan program modernisasi F-5 E/F Tiger II bekerjasama dengan perusahaan penerbangan Belgia, *Societe Anonyme Belge de Construction Aeronautiques* (SABCA). Program yang dinamai *Modernisation of Avionics Capabilities for Armament and Navigation* (MACAN) dilaksanakan mulai 1 Juli 1999 sampai dengan 28 Februari 2001. Semasa Perang Dingin dan puncak kekuasaan Orde Baru pada 1980-an hingga 1990-an, F-5E Tiger menjadi kekuatan dirgantara yang terlibat dalam berbagai operasi.

Tahun 2000, AS mengizinkan Indonesia membeli suku cadang peralatan militer untuk kepentingan-kepentingan non-perang, misalnya suku cadang pesawat Hercules C-130 yang digunakan untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke Aceh setelah tsunami. Lima tahun kemudian, Kongres mengizinkan secara terbatas akses Indonesia ke hibah dan pinjaman untuk peralatan dan pelatihan militer.

Pada 28 April 2016 merupakan saat terakhir pesawat tempur ini melaksanakan misi penerbangan. Pada saat itu dua pesawat F-5 E Tiger II melaksanakan misi *Simulated Surface Attack* (Phoenix Flight) dengan TS-0216. Pada bulan Mei 2016, berdasarkan telegram, pimpinan TNIAU Nomor T/719/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang penghentian sementara pengoperasian seluruh pesawat F-5 E/F Tiger Skadron II Skadron Udara Lanud Iswahjudi, Komandan Skadron Udara 14 Letkol Pnb Abdul Haris memerintahkan kepada penerbang untuk menghentikan operasional pesawat F-5 E/F Tiger II. Pesawat tempur F-5-E/F Tiger II TNI AU akhirnya purna tugas setelah 35 tahun mengudara. Saat ini, F-5-E/F Tiger II resmi menjadi monumen di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, Yogyakarta.

Selain F5 Tiger, pesawat yang dimiliki Indonesia dari AS juga ada 12 unit F-16 yang telah dimiliki sejak tahun 1989. Tahun 2011, Indonesia menandatangani kesepakatan untuk membeli 24 unit F-16 Fighting Falcon bekas pakai dari AS senilai USD750 juta. April 2015, salah satu dari pesawat itu mengalami kecelakaan. TNI AU memutuskan tidak akan mengoperasikan pesawat tempur tersebut dan memutuskan akan mengevaluasi setiap pesawat hasil hibah. Hubungan AS-Indonesia dalam bidang pertahanan diwarnai oleh berbagai hal seperti embargo penjualan senjata militer dari AS ke Indonesia akibat isu pelanggaran HAM.

C. Sejarah Pembelian Pesawat Sukhoi di Indonesia

1. Era Presiden Megawati Soekarnoputri

Pada tahun 2001, era Putri Presiden Soekarno, Presiden Megawati Soekarnoputri mulai menggiatkan lagi hubungan Indonesia dengan Rusia setelah sebelumnya hubungan kedua negara sempat membeku di era Presiden Soeharto. Hal tersebut terbukti ketika KTT APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2001 di Shanghai, Presiden Megawati dan Presiden Rusia, Vladimir Putin sempat mengadakan pertemuan.⁴¹ Tidak hanya sampai disitu, kedekatan kedua negara berlanjut pada tanggal 27 September 2002 ketika Menteri Luar Negeri Indonesia, Hasan Wirajuda

⁴¹ Emilia Yustiningrum, *Enam Dekade Dinamika Persahabatan Indonesia-Rusia*, Pusat Penelitian Politik, diakses dari <http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/eropa/392-enam-dekade-dinamika-persahabatan-indonesia-russia-.html>, pada tanggal 2 Februari 2018

melakukan kunjungan resmi ke Rusia untuk melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Igor Ivanov berkaitan dengan akan dibuatnya komitmen baru hubungan kerja sama antara Indonesia dan Rusia. Kunjungan tersebut merupakan momentum yang melahirkan komitmen baru bagi kedua negara untuk memasuki tahapan kerja sama yang lebih tinggi. Dalam pertemuan bilateral tersebut juga dilakukan penandatanganan Memorandum Konsultasi Bilateral antara Kementerian Luar Negeri yang menyepakati bahwa suatu ketika akan meningkat menjadi Konsultasi Bilateral Antar Pemerintah. Sementara itu, kedua negara untuk pertama kalinya mengadakan Sidang Komisi Bersama dalam format baru guna mendorong peningkatan hubungan ekonomi, perdagangan, dan iptek.⁴²

Peristiwa tersebut juga mempunyai makna penting mengingat hubungan Indonesia-Rusia dari masa ke masa yang pasang surut dan kini saatnya untuk meningkatkan hubungan ke tahap yang lebih erat. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama setelah Uni Soviet runtuh. Runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya perang dingin sedikit banyak telah berpengaruh terhadap hubungan kedua negara. Hubungan baik kedua negara terus berlanjut, pada 13 Oktober 2002 Presiden Putin mengirimkan kawat kenegaraan yang berkaitan dengan upaya Indonesia untuk memerangi terorisme. Di tahun berikutnya, pada 9 Oktober 2003 Rusia kembali mengirimkan kawat kenegaraan terkait peristiwa kecelakaan yang terjadi di Jawa Timur.⁴³

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

Presiden Megawati secara resmi melakukan kunjungan ke Rusia pada April 2003. Dalam kesempatan ini, kedua kepala negara menandatangani deklarasi mengenai kerangka kerja hubungan persahabatan dan kemitraan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia dalam abad ke-21. Deklarasi ini berisi sejumlah kesepakatan seperti, kerja sama teknologi ruang angkasa, perbankan, dan kerja sama teknik militer yang lebih erat di masa depan.

Kunjungan Presiden Megawati yang berlangsung selama lima hari di Moskow terlihat lebih mengutamakan pembelian persenjataan. Agenda utamanya adalah mengunjungi uji pesawat jet Sukhoi di Zhukovsky dan menonton aksi terbang jet tempur SU-27 didampingi oleh petinggi Sukhoi, Mikail A. Pogosyan.⁴⁴ Presiden Megawati kemudian mengatakan kemungkinan kontrak pembelian pesawat Sukhoi SU-27 dan SU-30. Seluruh pesawat ini akan digunakan untuk memperkuat kemampuan tempur TNI Angkatan Udara.

Indonesia sempat ingin memiliki pesawat Sukhoi Rusia pada era Presiden Soeharto namun gagal membelinya. Tahun 1997-1998 terjadi krisis moneter yang melanda dunia, termasuk Indonesia yang terkena imbasnya. Saat itu Indonesia ingin membeli 12 unit pesawat Sukhoi jenis SU-30 KI untuk meningkatkan kemampuan TNI AU dalam menjaga kedaulatan Indonesia.

Tahun 1995 Indonesia mulai diembargo militer oleh Amerika Serikat dan sekutunya karena dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yaitu

⁴⁴ Tomi Lebang, *Sahabat Lama Era Baru*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 46

terjadi penembakan kepada para demonstran di Gereja Santa Cruz, Dili, Timor Timur pada tahun 1991.⁴⁵

Selama embargo sepuluh tahun, Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan suku cadang dan perawatan operasional peralatan tempur, baik angkatan darat, angkatan laut, maupun angkatan udara. Angkatan udaralah yang paling mendapat pengaruh besar oleh kebijakan embargo militer Amerika Serikat terhadap Indonesia ini. Pesawat tempur dan pesawat angkut yang dimiliki terpaksa dihanggarkan karena tidak tersedianya suku cadang. Embargo tersebut menyebabkan alutsista Indonesia yang dibeli dari Amerika Serikat dan sekutunya tidak bisa digunakan karena diberhentikannya penjualan senjata serta suku cadangnya.

Karena peristiwa tersebut, Presiden Soeharto merasa geram dengan tingkah Amerika Serikat. Beliau kemudian melakukan suatu tindakan “berpaling” dari Amerika Serikat dengan melakukan pemesanan 12 unit pesawat Sukhoi ke Rusia. Selama kepemimpinan Presiden Soeharto, hubungan Indonesia-Rusia terus meredup diakibatkan terjadi pergolakan politik domestik yaitu terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia atau pemberontakan PKI pada tahun 1965. Berdasarkan Tap MPRS No. XXV tahun 1966 yang berisi tentang

⁴⁵ Atdikbud USA, *Hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia Sebelum dan Sesudah Embargo Senjata, Dikaji Dalam Bidang Militer*, The Indonesian Education and Cultural Section in Washington, D.C., diakses dari <http://education.embassyofindonesia.org/2013/10/hubungan-amerika-serikat-dengan-indonesia-sebelum-dan-sesudah-embargo-senjata-dikaji-dalam-didang-militer/>, pada tanggal 3 Februari 2018

larangan penyebaran komunis di Indonesia.⁴⁶ Karenanya, Uni Soviet sebagai sebuah negara yang menganut komunisme terkena akibatnya. Mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di Uni Soviet dipulangkan, begitupun dengan para ilmuwan yang bekerja di Indonesia dipulangkan ke Uni Soviet. Hubungan kedua negara yang terjalin begitu harmonis di era Presiden sebelumnya seketika membeku di masa orde baru ini.

Pada masa ini, kondisi dalam negeri sedang beres-beres dalam perubahan orientasi politik luar negeri. Indonesia membutuhkan banyak biaya untuk melaksanakan pembangunan, oleh karena itu Indonesia perlu bantuan dana dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat. Pada era Presiden Soekarno Indonesia memang banyak memiliki persenjataan militer dari Rusia, namun di era Presiden Soeharto, persenjataan TNI dipenuhi oleh persenjataan dari Amerika Serikat dan sekutunya.

Namun, terus ada upaya-upaya agar hubungan bilateral kedua negara membaik kembali. Presiden Soeharto mengunjungi Uni Soviet pada tanggal 7-12 September 1989.⁴⁷ Dalam kunjungan tersebut ditandatangani pernyataan mengenai dasar-dasar hubungan persahabatan dan kerjasama antara negara Indonesia-Uni Soviet pada tanggal 11 September 1989. Dokumen tersebut mempunyai nilai penting karena akan menjadi dasar dalam rangka mengembangkan kerja sama di berbagai bidang.

⁴⁶ Prima Gumilang, *Refly Harun: Ketetapan MPRS Soal Komunisme Bisa Dicabut*, CNN Indonesia, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160513093559-20-130435/refly-harun-ketetapan-mprs-soal-komunisme-bisa-dicabut>, pada tanggal 2 Februari 2018

⁴⁷ Emilia Yustiningrum, *Loc.Cit.*

Tahun 1991, Uni Soviet dinyatakan bubar. Tanggal 28 Desember 1991, melalui surat Menteri Luar Negeri Indonesia kepada Menteri Luar Negeri Rusia, Indonesia secara resmi mengakui Federasi Rusia sebagai pengganti sah dari Uni Soviet.⁴⁸ Setelahnya, hubungan Indonesia-Rusia mulai menunjukkan peningkatan baik di bidang pendidikan, budaya, maupun ekonomi.

Pada Juni 1996, Indonesia sebenarnya sudah tertarik dengan pesawat Sukhoi Rusia ketika melihat kehebatannya tampil di ajang *Indonesia Air Show*. Dari ketertarikan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh salah satu Menteri Indonesia yang berkunjung ke Rusia untuk membeli 12 unit pesawat Sukhoi seperti yang telah direncanakan. Indonesia tidak ingin bergantung kepada satu negara saja dalam bidang pembelian persenjataan, apalagi negara-negara barat yang pembelian persenjataannya selalu dikaitkan dengan syarat politik.

Setelah perang dingin berakhir pada tahun 1991 dan Amerika Serikat keluar sebagai pemenangnya karena runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat dianggap sebagai satu-satunya negara adidaya yang menghegemoni dunia. Kekuatan hegemoni tersebut sampai di Indonesia ketika Amerika Serikat tidak ingin Indonesia memiliki pesawat Sukhoi milik Rusia. Amerika Serikat takut jika Indonesia membeli pesawat Sukhoi akan menyebabkan hubungan baik kembali dengan Rusia seperti saat kepemimpinan Presiden Soekarno. Akan tetapi, krisis moneter 1997-1998

⁴⁸ KBRI Moscow, *Hubungan Bilateral Antara Indonesia dan Rusia 1945-2011*, diakses dari <https://www.kemlu.go.id/moscow/lc/Pages/Rusia3.aspx>, pada tanggal 5 Februari 2018

membuat Indonesia terpaksa membatalkan pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia.

Kegagalan Indonesia membeli pesawat Sukhoi pada tahun 1998 dan diembargonya alutsista Indonesia yang dibeli dari Amerika Serikat beserta sekutunya membuat persenjataan dalam negeri berada dalam keadaan stagnan bahkan bisa dibilang mengalami degradasi yang cukup signifikan.⁴⁹ Pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, F-5 Tiger, dan pesawat angkut Hercules C-130 tidak bisa digunakan akibat diberhentikannya pembelian suku cadang saat itu. Hal tersebut berakibat fatal dimana pesawat F-16 jatuh di lintasan Lanud Halim Perdanakusuma yang menewaskan seorang pilotnya. Peristiwa yang terjadi pada 10 Maret 1997 tersebut terjatuh ketika sedang melaksanakan *Air Combat Patrol* di sekitaran langit Jakarta. Dari hasil penyelidikan, pesawat jatuh diakibatkan penggunaan paksa suku cadang kanibal yang tidak sesuai. Pada bulan Juli 2002, hanya 30 pesawat dari 89 pesawat TNI AU yang bisa digunakan secara operasional. Pada tahun 2005, Menteri Pertahanan mengatakan bahwa hanya 4 dari 10 pesawat tempur F-16 TNI AU yang bisa diterbangkan.⁵⁰ Pesawat TNI AU berjenis Hawk dari Inggris pun tidak bisa terbang akibat embargo yang diberlakukan Inggris kepada Indonesia. Embargo tersebut merupakan hasil ikut-ikutan Inggris sebagai sekutu Amerika Serikat. Akibatnya, TNI AU hanya memiliki 20% kekuatan saat embargo berlangsung.

Hal tersebut membuat Presiden Megawati mengambil langkah taktis dengan melakukan

⁴⁹ Alexandra R. Wulan, *Satu Dekade Reformasi Militer Indonesia*, (Depok: Pasivis, 2008), hal. 112

⁵⁰ *Ibid.* hal. 113

kunjungan ke Rusia dan sejumlah negara Eropa Timur untuk melepaskan diri dari embargo ini. Langkah tersebut ternyata mendapat respon positif dari Rusia.

Indonesia memiliki luas wilayah daratan dan perairan yang besar di Asia Tenggara. Jumlah penduduknya pun yang terbesar di Asia Tenggara. Jumlah alutsista yang dimiliki Indonesia tidak sebanding untuk melakukan pengamanan dan menghadapi ancaman maupun bentuk perang yang tidak lagi konvensional. Penguasaan teknologi bagi tentara Indonesia adalah sebuah keharusan. Akan tetapi, kondisi alutsista yang dimiliki sebagian besar adalah persenjataan tahun 1960an-1980an. Untuk itulah Presiden Megawati merasa perlunya akan modernisasi persenjataan Indonesia.

Sementara itu, ketika menjelaskan hasil pembicaraannya dengan Presiden Putin yang mencakup masalah internasional, Presiden Megawati menyebutkan kedua negara sepakat untuk ikut memerangi masalah terorisme internasional diantaranya dengan melalui pertukaran informasi termasuk pertukaran intelijen.

Kemudian, Presiden Putin mengatakan bahwa Rusia menghargai Indonesia dalam berbagai forum. Dalam pertemuan empat mata dan pertemuan pleno yang didampingi para menteri, Presiden Megawati menyampaikan undangannya kepada Presiden Putin untuk mengunjungi Indonesia secepatnya.⁵¹

Sebelum kedua kepala negara menandatangani deklarasi hubungan persahabatan dan kemitraan abad ke-21, Menteri Riset dan Teknologi, Hatta Rajasa menandatangani kerja sama teknologi ruang angkasa.

⁵¹ Tomi Lebang, *Loc. Cit.*

Rusia menawarkan bantuan untuk ikut membangun pusat peluncuran roket dan satelit di Biak, Papua. Apabila nanti kerja sama tersebut terwujud, peluncuran tidak akan dilakukan di darat, tetapi di udara. Berdasarkan program tersebut, pesawat Rusia yang akan dibeli adalah dari jenis Antonov yang mampu membawa roket dan satelit pada ketinggian tertentu. Antonov akan melepaskan roket dan kemudian roket tersebut akan meluncurkan satelit yang dibawanya itu. Rusia juga menawarkan pemasokan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang bisa dibawa kapal laut sehingga mempunyai mobilitas tinggi. PLTN terapung tersebut bisa memproduksi listrik sekitar empat puluh megawatt.⁵²

Sebelum mengadakan pertemuan pleno, Presiden Megawati dan Presiden Putin mengadakan pembicaraan empat mata terlebih dahulu. Pada saat itu, Presiden Megawati menyampaikan harapannya agar kedua negara dapat meningkatkan kerja sama baik di bidang sosial, budaya, politik, dan militer.

Dalam pertemuan tersebut, tulisan *Bringing Rusia to the World and World to Rusia* menyebutkan bahwa Presiden Megawati menandatangani kontrak pembelian dua pesawat Sukhoi SU-27MK, dua pesawat Sukhoi SU-30MK, dan dua helikopter tempur MI-35. Pembelian ditandatangani pada tanggal 22 April 2003. Presiden Megawati menanyakan kepada Presiden Putin terkait cara-cara pembiayaan kerjasama tersebut, termasuk kemungkinan imbal dagang dan *joint venture* industri militer. Ketika ditanyakan hal tersebut, Presiden Putin pada saat itu menjawab

⁵² Tomi Lebang, *Op. Cit.* hal. 47

dengan “*up to you*”.⁵³ Kemudian disepakatilah pembelian pesawat sukhoi tersebut dengan imbal dagang. Komoditas untuk imbal dagang tersebut diantaranya produk *CPO (Crude Palm Oil)* atau minyak kelapa sawit mentah dan karet. Total transaksi pembelian pesawat ini kurang lebih USD192 juta.

Kontrak pembelian pesawat Sukhoi banyak mendapat protes dari berbagai pihak karena dilakukan di tengah krisis ekonomi dan tekanan defisit APBN pada saat itu. Namun, pembelian ini merupakan akibat dari permasalahan dalam negeri yaitu kebutuhan alutsista yang perlu untuk dimodernisasi demi memperkuat sistem pertahanan nasional. Protes terhadap pembelian pesawat Sukhoi ini bahkan berasal dari kalangan legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sampai membentuk sebuah tim khusus untuk menyelidiki tentang pembelian pesawat Sukhoi ini yang kemudian disebut sebagai *Sukhoi Gate*. Para kritikus menegaskan bahwa kesepakatan pembelian Sukhoi tersebut telah melanggar UU pertahanan. Kesepakatan pengadaan alutsista di Indonesia harus melalui Departemen Pertahanan untuk mendapatkan persetujuan sebelum akhirnya diajukan ke Kementerian Keuangan dan Parlemen untuk menghitung anggaran. Mereka merasa dalam kesepakatan ini telah terjadi penyimpangan.

⁵³ Faieq Hidayat, *Cerita Megawati Saat Beli Pesawat Sukhoi Milik Rusia*, detikNews, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3569146/cerita-megawati-saat-beli-pesawat-sukhoi-milik-rusia>, pada tanggal 2 Februari 2018

Gambar 2 3 Prototype SU-27 SK/SKM



Sumber: TNI AU, Sukhoi SU-27

Nyatanya, Indonesia tetap membeli pesawat dua unit pesawat tempur SU-27SK dengan kursi tunggal dan dua unit SU-30MK dengan kursi ganda walaupun kehadirannya masih belum dilengkapi dengan persenjataan. Pesawat tempur SU-27SK tiba di Lanud Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur pada 27 Agustus 2003 dan SU-30MK tiba di Indonesia seminggu kemudian serta dua unit helikopter Mi-35 yang tiba pada bulan September.⁵⁴

Banyak pihak yang ragu akan kemampuan pesawat Sukhoi ini, namun setelah melihat kemampuannya yang luar biasa berbagai pihak mulai mendukung Indonesia untuk melengkapi Sukhoi hingga satu skuadron walaupun banyaknya kontroversi dari berbagai pihak dalam pembelian tahap pertama ini. Hubungan Indonesia-Rusia semakin membaik di era Presiden Megawati. Kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama teknik militer.⁵⁵ Periode ini

⁵⁴ Hasan Sentot, *Dua Sukhoi SU-27 Tiba di Lanud Iswahyudi*, Liputan 6, diakses dari <http://www.liputan6.com/news/read/61178/dua-sukhoi-su-27-tiba-di-lanud-iswahyudi>, pada tanggal 4 Februari 2018

⁵⁵ Emilia Yustiningrum, *Loc.Cit.*

menjadi dasar pengembangan kerja sama teknik militer yang kedepannya dapat membantu Indonesia dalam meningkatkan kekuatan militernya demi menjaga kedaulatan negara.

2. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hubungan Indonesia-Rusia semakin terbentuk. Era ini merupakan era yang cukup baik untuk kembali melanjutkan kerja sama dengan Rusia. Bagi Indonesia, penting untuk memperluas mitra strategis di seluruh dunia. Rusia merupakan salah satu mitra Indonesia yang mempunyai potensi besar dalam bidang pertahanan militer.

Selama menjabat sebagai Presiden Indonesia, Presiden SBY melakukan kunjungan kenegaraan sebanyak tiga kali ke Rusia, kemudian pertemuan di Jakarta tanggal 6 September 2007 merupakan pertemuan yang keempat, dan dilanjutkan dengan pertemuan kelima pada saat KTT APEC di Australia.⁵⁶

Selain itu, pertemuan Presiden kedua negara juga terjadi di beberapa dialog politik tingkat tinggi yang sedang berkembang secara dinamis saat itu. Presiden SBY dan Presiden Putin bertemu di sela-sela KTT APEC di Honolulu, Hawaii pada tanggal 12 November 2011. Pertemuan lainnya juga terjadi pada tanggal 20 Juni 2012 di sela-sela KTT G 20 di Los Cabos, Meksiko dan juga ada perbincangan singkat di

⁵⁶ *Ibid.*

sela-sela KTT APEC di Vladivostok, Rusia pada tanggal 8 September 2012.⁵⁷

Dalam kunjungan Presiden SBY ke Rusia, bentuk kerja sama yang diutamakan yaitu di bidang pertahanan, politik, ekonomi, dan hukum. Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Rusia pada era Presiden SBY dimulai ketika pada tahun 2005 pemerintah Rusia menawarkan untuk bekerja sama dalam bidang pertahanan. Indonesia-Rusia sepakat untuk membentuk Komisi Kerjasama Teknik Militer (KKTm). Pembentukan KKTm tersebut kemudian ditandatangani dalam sidang komisi pertama di Rusia pada tanggal 22 September 2005.⁵⁸

Pelaksanaan kerja sama pertahanan militer Indonesia-Rusia pada era SBY ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pertahanan militer dalam negeri yang mencakup kondisi alutsista saat itu. Walaupun di era Presiden SBY ini Amerika Serikat telah mencabut embargo militernya terhadap Indonesia, hal ini tidak membuat Indonesia berhenti berhubungan dengan

⁵⁷ Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia, *Hubungan Rusia-Indonesia*, diakses dari https://indonesia.mid.ru/web/indonesia_ind/hubungan-bilateral-rusia-indonesia/-/asset_publisher/mFy5hjPytUA3/content/hubungan-rusia-indonesia-referensi-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Findonesia.mid.ru%3A443%2Fweb%2Findonesia_ind%2Fhubungan-bilateral-rusia-indonesia%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mFy5hjPytUA3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3, pada tanggal 4 Februari 2018

⁵⁸ Rindu Novana, *Kerjasama Indonesia Dengan Rusia Dalam Bidang Pertahanan Militer Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2004-2009*, dalam *Jurnal Transnasional* Vol. 3 No.2 Tahun 2012, hal. 2

Rusia, namun tetap menjalin hubungan baik juga dengan Amerika Serikat. Kerja sama Indonesia dengan Rusia ini tentu akan berdampak baik di masa depan agar Indonesia tidak hanya bergantung pada satu negara saja dalam hal pengadaan alutsista. Kerja sama Indonesia-Rusia bukan berarti Indonesia telah mengubah kebijakan luar negeri yang selama ini cenderung ke barat. Akan tetapi, kerja sama Indonesia-Rusia ini menunjukkan kembali bahwa Indonesia menganut kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Indonesia selalu berupaya untuk menjaga keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri agar tidak terhambat oleh politik ataupun hal lainnya.

Pada pertemuan di Rusia antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Vladimir Putin tanggal 29 November 2006, disepakati kerja sama di bidang ekonomi, politik, dan militer. Di bidang ekonomi, Presiden SBY mendorong investasi Rusia agar masuk ke Indonesia, karena volume perdagangan kedua belah pihak pada tahun 2005 mencapai US\$680 juta, angka tersebut melebihi 42% hasil tahun 2004 yaitu US\$480 juta.⁵⁹

Pada tanggal 6 September 2007, Presiden Putin mengadakan kunjungan resmi ke Indonesia. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan terhadap kunjungan Presiden SBY pada 2006 lalu. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama dari Presiden Rusia sejak tahun 1991.⁶⁰ Dalam kunjungan itu, Presiden Putin ingin mengkaji ulang hubungan kerjasama yang telah terjalin sejak tahun

⁵⁹ *Ibid.* hal. 8

⁶⁰ *Ibid.* hal. 9

2003, terutama di bidang militer dan ekonomi perdagangan.

Bentuk kerja sama pertahanan yang akan dilakukan dengan Rusia berupa penjualan senjata dan alat pertahanan buatan Rusia kepada Indonesia. Selain itu, juga diusahakan peningkatan kemampuan manajemen perwira dengan bersekolah setingkat Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Indonesia atau sebaliknya. Serta peningkatan kemampuan pasukan khusus, misalnya pelatihan spesialisasi pilot pesawat dan spesialisasi pilot kapal selam.

Pada tahun 2008 Indonesia mendapat tawaran pinjaman *state credit* sebesar USD 1 miliar untuk pengadaan persenjataan Indonesia untuk masa periode selama lima tahun. Nantinya akan diambil dari *State Credit* yang sudah disepakati Pemerintah Indonesia untuk seluruh kebutuhan alutsista TNI sebesar USD 3,7 miliar sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).⁶¹ Jadi, total *State Credit* sebesar USD 3,7 miliar yang akan digunakan untuk memenuhi alutsista TNI selama periode 2004-2009, USD 1 miliar khusus untuk pengadaan alutsista dari Rusia, sedangkan sisanya USD 2,7 miliar digunakan untuk memenuhi pengadaan alutsista dari negara lain, seperti Amerika Serikat, Polandia, India, China, dan Australia.

Kredit negara ini mempunyai keunggulan berupa efisiensi, karena tidak memakai *management fee* dan syarat lainnya.⁶² Teknis dari proses pembelian alutsista dilaksanakan secara bertahap dari tahun ke tahun selama jangka waktu lima tahun. Pembayaran

⁶¹ *Ibid.* hal. 11

⁶² *Ibid.*

tahun pertama sekitar USD 220 juta, nantinya uang muka akan dibayarkan oleh Menteri Keuangan sebesar USD 16,4 Juta dan dilaksanakan tahun 2007, tergantung pencairan dana APBN. Pinjaman tersebut akan digunakan Departemen Pertahanan Indonesia untuk pengadaan persenjataan bagi TNI AD yaitu, 10 helikopter MI-17-V5 dan 5 Helikopter MI-35P beserta persenjataannya untuk kebutuhan helikopter serbu dan transportasi; bagi TNI AL yaitu, 2 kapal selam kelas kilo dan 20 kendaraan infanteri tempur BMP-3F; dan untuk TNI AU yang menjadi prioritas akan ada dilengkapinya satu skuadron pesawat tempur Sukhoi, dimana sebelumnya Indonesia telah memiliki 4 Pesawat Sukhoi pada era Presiden Megawati. Setelah 4 Pesawat Sukhoi diberikan senjata, maka dilanjutkan dengan pengadaan kembali 6 Pesawat Sukhoi.

Keinginan Indonesia untuk menambah pesawat Sukhoi semakin menguat ketika tahun 2005 Malaysia melakukan klaim terhadap wilayah perairan Indonesia yaitu perairan Ambalat. Dikarenakan Malaysia yang menganggap sebelah mata Indonesia, maka TNI AU melakukan modernisasi terhadap alutsista Indonesia untuk menjawab klaim perairan tersebut.

Gambar 2 4 Prototype SU-30 MK



Sumber: TNI AU, Sukhoi SU-30

Akhirnya, Indonesia menandatangani pembelian 6 unit pesawat Sukhoi yang terdiri dari 3 unit Sukhoi SU-27SK dan 3 unit Sukhoi SU-30MK, serta 6 paket peralatan avionik dan persenjataan Sukhoi TNI AU. Pembelian pesawat ini memakan biaya sebesar USD 300 juta (sekitar Rp2,85 triliun) yang diumumkan oleh Departemen Pertahanan saat acara *Moskow Air Show* (MAKS) tahun 2007.⁶³ Tiga unit pesawat SU-27SKM dan tiga unit SU-30MK2 tiba secara bertahap di Indonesia pada Desember 2008 hingga September 2010. Pesawat tempur tersebut nantinya akan diletakan di Lanud Sultan Hasanudin, Makassar.

Setelah memiliki 10 unit pesawat Sukhoi SU-27/30, Indonesia masih merasa perlu untuk melengkapi armada pesawat tersebut hingga satu skuadron demi menjaga luasnya wilayah Indonesia ini. Kemudian, Indonesia membeli lagi pesawat tempur Sukhoi jenis SU-30MK2 sebanyak 6 unit.

⁶³ Detik, *3 Sukhoi Rusia Tiba di Lanud Hasanuddin Makassar*, Detiknews, diakses dari <https://news.detik.com/berita/1078017/3-sukhoi-rusia-tiba-di-lanud-hasanuddin-makassar?nd771104bcj=>, pada tanggal 4 Februari 2018

Pembelian 6 unit pesawat ini melalui Kementerian Pertahanan Indonesia dengan produsen pesawat asal Rusia, Rosoboronexport. Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Imam Sufaat mengatakan bahwa keenam unit pesawat tiba di Indonesia secara bertahap dari tahun 2012 hingga 2014. Pesawat tersebut juga ditempatkan di Lanud Sultan Hasanudin, Makassar bersama dengan pesawat Sukhoi terdahulu. Menteri Pertahanan Indonesia, Purnomo Yusgiantoro mengatakan bahwa penambahan armada tempur ini memang merupakan bagian dari rencana pembangunan kekuatan TNI.

Sistem *State Credit* antara Indonesia-Rusia ini dilakukan dengan cara yang tidak berbelit-belit dan tanpa perantara atau G to G. Misalnya, Departemen Pertahanan (Dephan) ingin membeli alutsista dari Rusia, kemudian Dephan mengajukannya ke Depkeu dan setelah mendapat persetujuan, maka Dephan Indonesia langsung berhubungan dengan Dephan Rusia. Kemudian, Dephan Rusia akan menunjuk salah satu perusahaan Rusia yang memproduksi alutsista yang dibutuhkan Indonesia, misalnya perusahaan Rostec. Sehingga Rostec yang akan berhadapan dengan Dephan Indonesia.

Pada era Presiden SBY ini sasaran pengadaan alutsista dan pemeliharanya adalah berfokus pada peningkatan jumlah dan kondisi peralatan pertahanan agar mampu menyelenggarakan pertahanan negara secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan skala prioritas ke arah pertahanan yang integratif matra darat, laut, dan udara. Terkait hal tersebut maka perlu pergantian alutsista yang sudah habis masa pakainya dengan persenjataan berteknologi terkini untuk meningkatkan kualitas senjata guna mencapai kekuatan pokok minimum TNI.

Memfaatkan pinjaman Rusia untuk memperkuat alat pertahanan memberi keuntungan bagi Indonesia di tengah krisis pendanaan untuk modernisasi alat pertahanan. Pembelian persenjataan melalui kredit dari Rusia ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayah. Penambahan persenjataan tempur akan memberikan efek deterens kepada negara-negara lain yang mencoba mengusik kedaulatan wilayah Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari pembelian pesawat tempur Sukhoi, Rusia mengirimkan dua belas orang teknisi militer untuk merakit pesawat di bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, pada tahun 2010. Tiga teknisi meninggal dunia karena keracunan methanol dalam minuman keras meskipun hal tersebut dibantah oleh Kedutaan Rusia di Indonesia.⁶⁴ Akan tetapi, Rusia kemudian mengirimkan teknisi pengganti sehingga proses perakitan pesawat tetap berjalan tanpa mempengaruhi hubungan kedua negara.

3. Era Presiden Joko Widodo

Di Era Presiden Joko Widodo, kebijakan Renstra terus dilanjutkan. Renstra tahap dua dimulai tahun 2014 atau sejak Presiden Jokowi menjabat menjadi Presiden. Ada tiga fokus kebijakan Renstra tahap kedua, yaitu pertama, meningkatkan profesionalisme personel, kedua, modernisasi alutsista atau non-alutsista atau sarana dan prasarana matra

⁶⁴ Marcus Suprihadi, *Polisi: Tiga Teknisi Keracunan Methanol*, Kompas, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2010/09/15/17460831/polri.tiga.teknisi.keracunan.methanol>, pada tanggal 20 Januari 2018

udara, dan yang terakhir adalah pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terdepan dan terluar.

Era Presiden Joko Widodo berfokus pada pembangunan infrastruktur dalam negeri dari awal kabinet berjalan. Menurutnya, infrastruktur adalah salah satu kunci untuk memenangkan persaingan pada era kompetisi global. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beberapa capaian yang telah diraih dalam pembangunan infrastruktur terdiri dari pembangunan jalan baru, jalan perbatasan, jalan tol, jembatan, bandara, bendungan, hingga perumahan.⁶⁵ Untuk membangun seluruh infrastruktur tersebut tentu dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) mengestimasikan biaya untuk pembangunan seluruh sektor infrastruktur hingga 2019 mencapai Rp5.519,4 triliun. Dalam estimasi tersebut, sebesar Rp2.215,6 triliun berasal dari pemerintah pusat melalui dana APBN.⁶⁶

Walaupun pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama, bidang pertahanan juga menjadi hal yang diprioritaskan. Presiden Joko Widodo pada sidang komite kebijakan industri pertahanan tahun 2014 mengatakan empat kebijakan prioritas dalam bidang pertahanan. Salah satu kebijakannya yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan baik yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista.⁶⁷

Sesuai dengan fokus kedua kebijakan Renstra tahap kedua yaitu modernisasi alutsista, TNI AU melakukan modernisasi alutsista pengganti F-5 Tiger

⁶⁵ Eduardo Simorangkir, *Loc. Cit.*

⁶⁶ Ridwan Aji Pitoko, *Loc. Cit.*

⁶⁷ Resty Armenia, *Loc. Cit.*

yang sudah dipurna tugaskan sejak tahun 2016 atau setelah 35 tahun mengudara. Kepala Staf TNI AU (KSAU), Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan telah mengajukan berkas untuk pengganti pesawat tempur F-5 Tiger tersebut namun tidak disebutkan apa jenis dan merk pesawatnya karena tugas TNI AU yang sebagai pengguna hanya menyebutkan spesifikasi apa yang dibutuhkan, keputusan akan berada di tangan Kementerian Pertahanan.

Mendengar TNI AU ingin mengganti pesawat tempurnya, beberapa pabrikan jet tempur dunia berlomba-lomba menawarkan produk buaatannya. Diantaranya ada Saab JAS 39 Gripen buatan Swedia, Dassault Rafale buatan Perancis, Eurofighter Typhoon buatan konsorsium empat negara Eropa Barat (Spanyol, Inggris, Jerman, Italia), F-16 Viper buatan AS, dan Su-35 Super Flanker buatan Rusia. Dari pilihan-pilihan tersebut, keluarlah pilihan untuk membeli pesawat Sukhoi SU-35 buatan Rusia sesuai dengan yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu, setelah rapat dengan Presiden Joko Widodo pada 26 Juli 2017, bahwa Indonesia akan membeli sebanyak 11 buah pesawat Su-35.⁶⁸ Keputusan tersebut tentu sudah sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang disebutkan oleh TNI sebagai pengguna pesawat tempur.

Hal tersebut telah disepakati dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/Mou) yang ditandatangani pada 10 Agustus 2017 saat pelaksanaan misi dagang ke Rusia yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita. Pembelian

⁶⁸ Rizky Andwika, *Loc. Cit.*

11 pesawat tempur Su-35 ini memakan biaya senilai \$1.14 milyar atau sekitar Rp15 triliun.⁶⁹

Setelah penandatanganan nota kesepahaman, Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan sudah menandatangani kontrak pembelian pada 14 Februari 2018 di Jakarta.⁷⁰ Kontrak tersebut ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda TNI Agus Setiadjie dengan delegasi dari pihak Rusia, Yuri. Mekanisme pembayaran selanjutnya akan dilakukan dengan sistem imbal dagang dengan komoditas dalam negeri sebesar 50% dari nilai pembelian.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Indonesia, Brigadir Jenderal TNI Totok Sugiharto mengatakan bahwa kontrak pembelian telah diteken dan tinggal menunggu proses pembuatan Sukhoi. Kontrak efektif tercatat per Agustus 2018. Pengiriman Sukhoi ke Indonesia akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama, dua unit akan dikirim pada Agustus 2019. Tahap kedua, enam unit akan dikirim setelah 18 bulan kontrak efektif yaitu pada Februari 2020. Dan tiga unit terakhir akan dikirim setelah 23 bulan kontrak efektif yaitu pada Juli 2020.⁷¹ Pesawat tempur tersebut nantinya sudah dilengkapi dengan persenjataan *full combat*.

⁶⁹ Radhitya Diva Putra, *Loc. Cit.*

⁷⁰ Dias Saraswati, *Loc. Cit.*

⁷¹ *Ibid.*